

## **REFLEKSI KRITIS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DAN TANTANGANNYA**

Farid Abdullah<sup>1</sup>, Iwan Zahar<sup>2</sup>, Indina Tarjiah<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta

<sup>3</sup>Universitas Negeri Jakarta

farid.abdullah@upi.edu

### ***Abstract***

*Nadiem Makarim, the Minister of Education and Culture, has been in charge of the "Freedom of Learning" policy from its inception in 2020. This strategy, like those of previous education ministers, sparked heated arguments about the benefits and drawbacks. What does it mean to have a philosophy of free learning that is still founded on Paulo Freire's educational philosophy? After the Covid-19 epidemic, which pushed many students and instructors to study online, the Free Learning Policy gained traction. This approach was eventually adopted at the tertiary level as "Independent Learning-Independent Campus" (MBKM). This study employs a descriptive-analytic method in the form of a literature evaluation of Paulo Freire's educational philosophy (1972). Freire's concept of learning freedom and its application were more suited during the Soeharto era, when educational circumstances and educational aid were not what they are now. Nonetheless, Freire's pluralist thinking is extensively incorporated in the curriculum to empower non-fanatical ways of thinking about religion, ethnicity, gender, and other issues. The theological freedom movement in Latin America was sparked by Freire's critical thought. Minister of Education Nadiem Makarim's concept of independent education emphasizes the flexibility to conduct internships in firms or study cross-disciplinary topics, which is actually more towards inter- and transdisciplinary thinking. Meanwhile, the notion of increasing teachers' welfare, among other things, is a continuation of the previous program, thus it can be argued that teachers' and students' economic situations have progressed since Freire's critical thinking about social and economic disparity during the Suharto period. The concept of gender equality and sexual harassment, on the other hand, is a step forward in free education.*

*Keywords: Freire's critical thinking, freedom to learn, intolerance*

### ***Abstrak***

Sejak awal diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, meluncurkan kebijakan "Merdeka Belajar" pada tahun 2020. Kebijakan ini, seperti Menteri-menteri pendidikan sebelumnya, juga menimbulkan perdebatan serius, pro-kontra. Apa yang dimaksud dengan filosofi Merdeka Belajar masih berpijak pada filsafat pendidikan Paulo Freire? Kebijakan Merdeka Belajar kemudian mendapatkan momentum dengan pandemik Covid-19, yang mendorong banyak siswa dan guru belajar secara daring (online). Di tingkat perguruan tinggi, kebijakan ini kemudian di implementasi menjadi "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" (MBKM). Tulisan ini memakai pendekatan deskriptif-analitik berupa kajian literatur filsafat pendidikan dari Paulo Freire (1972). Ide Freire tentang kemerdekaan belajar dan situasinya lebih tepat diterapkan saat era Soeharto yang kondisi pendidikan dan bantuan pendidikan tidak seperti saat ini. Pemikiran pendidikan merdeka dari Menteri Nadiem Makarim ini banyak juga

untuk menekankan kebebasan untuk magang di perusahaan atau belajar lintas ilmu yang sebenarnya lebih ke arah pemikiran inter dan transdisiplin ilmu. Sedangkan pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan guru dsb juga merupakan kelanjutan program sebelumnya, sehingga boleh dibilang kondisi ekonomi dari guru dan siswa sudah mulai lebih maju dibanding saat pemikiran kritis Freire mengenai ketimpangan sosial dan ekonomi di Era Presiden Suharto. Walaupun begitu pemikiran tentang kesetaraan gender dan pelecehan seksual membuat langkah maju dalam merdeka belajar.

**Kata Kunci:** pemikiran kritis Freire, merdeka belajar, intoleransi

## **Pendahuluan**

Ketika logika kapitalisme neoliberal yang digerakkan oleh pasar terus merendahkan nilai semua aspek kepentingan publik, salah satu konsekuensinya adalah bahwa perhatian keunggulan pendidikan mengenai kesetaraan dikesalkan, pendidikan untuk publik semakin menjadi milik individu dan tunduk pada korporat. Hal ini membuat guru direduksi menjadi teknisi, mengajar untuk ujian, menjinakan siswa dengan metoda tata kelola perusahaan, terutama di AS (Giroux, 2010). Apa yang terjadi pada tahap terakhir kapitalisme pasca-68 adalah bahwa ekonomi itu semakin memaksakan diri sebagai ideologi hegemonik. Atas nama formula sakral 'biaya rendah dan efisiensi tinggi', itu secara progresif ditembus oleh berbagai bentuk peraturan, atau kemitraan publik-swasta. (Žižek 2010). Apa yang diungkapkan oleh Žižek yang membenarkan bahwa konsumen adalah raja juga mulai berlaku di pendidikan, di Indonesia terutama pada sekolah-sekolah swasta. Seiring waktu, membenaran pendidikan diperbudak ide-ide tertentu dan keyakinan yang mengimplikasikan keinginan dan dorongan paling bawah dari alam bawah sadar kita. Žižek tidak memberikan jawaban untuk lepas dari cengkaman ide-ide tertentu tetapi menawarkan pedagogy "hag fish" atau ikan licin supaya kita bisa menemukan jawabannya sendiri (Wall dan Perrin, 2015).

Pendidikan sistem among dari Ki Hadjar Dewantara (KHD) merupakan pemberian kemerdekaan dan kebebasan pada anak atau murid untuk mengembangkan bakatnya sehingga mereka dapat menjadikan hidupnya bermanfaat bagi banyak orang (Marisyah, Firman, & Rusdinal, 2019). Jiwa merdeka yang ingin dicapai KHD pada pendidikan adalah berpikir positif dengan memahami sesuatu secara obyektif apa adanya. Berperasaan luhur dan indah sesuai keyakinan agama, dan berkemauan mulia untuk tata tentrem dan karta raharja (bahagia) (Hendratmoko, Kuswandi, & Setyosar, 2017). Sedangkan Pendidikan 4.0 dikawatirkan akan menjadikan siswa cenderung lebih impersonal, egosentris, kurang kembangkan jiwa sosial, budaya dan kemanusiaan (Agus, 2021).

## **Freire dan MBKM**

Universitas sekarang sebagian besar ditentukan melalui permintaan perusahaan bahwa mereka memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kredensial untuk membangun tenaga kerja untuk bersaing dan mempertahankan perannya sebagai kekuatan ekonomi dan militer global utama. Akibatnya, ada sedikit minat untuk memahami landasan pedagogis yang lebih tinggi pendidikan sebagai praktik kewarganegaraan, politik, dan moral yang mendalam - yaitu, pedagogi sebagai praktik untuk kebebasan. Karena sekolah semakin tunduk pada tatanan korporat, ada sisa-sisa kritis pendidikan diganti dengan

pelatihan dan janji keamanan ekonomi. Begitu pula dengan pedagogi sekarang tunduk pada rezim pengajaran yang sempit untuk ujian ditambah dengan sistem yang sering kali dengan kontrol disipliner, keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Selain itu, guru juga semakin direduksi menjadi status teknisi, dihapus dari memiliki kendali atas mereka ruang kelas atau struktur tata kelola sekolah. Mengajar untuk ujian dan korporatisasi pendidikan menjadi cara untuk 'menjinakkan' siswa dan menerapkan mode tata kelola perusahaan di dimana guru sekolah umum menjadi tidak terampil dan peningkatan jumlah pendidikan tinggi fakultas dikurangi menjadi posisi paruh waktu, yang merupakan kelas subaltern baru tenaga kerja akademik. Bagi Freire, pedagogy bukan suatu metode pembelajaran dan bukan juga indoktrinasi politik, melainkan politik yang menanamkan praktis moral yang menyediakan pengetahuan, ketrampilan dan hubungan relasi. Dampaknya akan membuat siswa menjadi masyarakat yang kritik membangun demokrasi (Giroux, 2010 p157).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, Merdeka belajar dalam Kampus merdeka merupakan slogan baru dari Menti Pendidikan di era pandemi Covid 19 yang sedang melanda. Ki Hadjar Dewantara mengartikan merdeka itu bukanlah hal yang ringan, melainkan membuat kita dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung orang lain dan dapat mengatur diri kita sendiri (Dewantara,

1977). Manusia, sebagai makhluk 'dalam suatu situasi' menemukan diri mereka berakar pada kondisi spasial-temporal yang menandai mereka dan yang juga mereka tandai. Mereka akan cenderung untuk merefleksikan 'situasionalitas' mereka sendiri sejauh mereka ditantang olehnya untuk menindaklanjutinya. Laki-laki karena mereka berada dalam suatu situasi. Dan mereka akan semakin mereka tidak hanya secara kritis merefleksikan keberadaan mereka tetapi secara kritis bertindak atasnya.

Freire (1970). “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai” ungkap Nadiem Anwar Makarim saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI, Rabu 4 Desember 2019 lalu. Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo dalam acara Pembukaan Konferensi Forum Rektor (FRI) virtual di istana Bogor, 4 Juli 2020, mengakui permasalahan pendidikan tinggi sangat rumit.

Presiden menyebutkan permasalahan perguruan tinggi yang kekurangan dosen, keterbatasan sarana, jumlah koleksi Pustaka, hingga ruang kelas yang tidak layak. Presiden meyakini Forum Rektor Indonesia memiliki peran besar dalam memajukan pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19. Peran besar FRI tidak sebatas sebagai forum komunikasi, namun juga saling berbagi, seperti koleksi perpustakaan, pertukaran dosen, hingga perkuliahan secara daring. Presiden juga berharap kerja sama pendidikan tinggi dengan industri di bidang penelitian dan pengembangan teknologi (merdeka.com, 2020).

Saat ini Indonesia menghadapi masalah pokok pendidikan, seperti

rendahnya mutu lulusan (quality), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (equity) dan relevansi antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kompetensi persyaratan dari dunia kerja. Belum sinkronnya antara desain dan implementasi pendidikan tinggi, perlu didorong untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi holistik baik softskill maupun hardskills. Permasalahan pokok ini pendidikan ini memperlihatkan masih banyaknya 'pekerjaan rumah' Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim dalam masa periode jabatannya.

Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dituntut peran aktif menjadi bagian dari solusi akan masalah Pendidikan tersebut. Terlepas dari pro dan kontra kebijakan yang diambil Nadiem, tulisan ini sebagai refleksi kritis untuk menggali tujuan dan potensi kebijakan terhadap Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di pendidikan. Pengertian belajar merdeka dengan memberikan kesempatan sebebaskan bebasnya untuk belajar dengan rilkes, gembira tanpa tekanan sehingga bisa mengembangkan bakat tanpa memaksakan mereka untuk belajar pengetahuan diluar hobi dan bakatnya (Abidah, N, M, D, & L, 2020).

Desain kurikulum pendidikan tinggi sangat diperlukan berupa perpaduan antara subjek yang berorientasi pada penguasaan ilmu, namun juga berbasis kompetensi yang fokus pada penguasaan untuk menjadi bekal hidup di masyarakat (life skills). Kebijakan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Di sisi lain, persaingan di tingkat ASEAN bahkan dunia, menuntut

Sumber Daya Manusia Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Dunia telah menjadi satu kampung kecil, dan menuntut kontribusi Sumber Daya Manusia yang unggul dan mampu bersaing.

Pada abad ke-21 ini Sumber Daya Manusia dituntut lebih besar pada ketrampilan berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecah masalah. Ketrampilan di abad ke-21 ini sebelumnya merubah paradigma Sumber Daya Manusia yang sebelumnya sangat manual, prosedural, dan pasif. Kemampuan kecakapan yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21 berorientasi berupa kecakapan terintegrasi antara ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan penguasaan berbasis teknologi internet. Maka perubahan paradigma terhadap kondisi kekinian, di tengah pandemi Covid-19, yang menuntut pembelajaran daring (online), semakin mempercepat kebutuhan Sumber Daya manusia yang adaptif, sesuai (adjustable) terhadap fenomena masa kini. Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga menjadi momentum percepatan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, dalam kata sambutannya di Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020 mengungkapkan bahwa Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat

kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.

Kecakapan abad ke-21 dapat dikembangkan melalui: (1) ketrampilan sumber daya manusia untuk berfikir kritis dan pemecah masalah; (2) kemampuan berkomunikasi yang tinggi; (3) ketrampilan mencipta, kreasi dan menghasilkan karya inovatif; dan (4) ketrampilan kolaborasi. Kesiapan dalam mengantisipasi kebutuhan tersebut, maka setiap mahasiswa diarahkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan aktifitas di dalam masyarakat, serta menjadi manusia yang produktif. Maka untuk menghasilkan SDM yang handal serta mampu bersain di abad ke-21 sangat diperlukan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan aplikatif, ketrampilan interpersonal dan ketrampilan intrapersonal. Termasuk kemampuan interpersonal adalah kemampuan melakukan komunikasi kompleks, ketrampilan sosial, kemampuan kerja sama, kepekaan terhadap budaya, serta menghargai keberagaman. Sedangkan ketrampilan intrapersonal adalah kemampuan manajemen diri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan

mengembangkan diri, dan mampu beradaptasi.

Ada beberapa tujuan pendidikan tinggi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai kerangka dasar untuk melahirkan sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman. Selain itu melalui kebijakan MBKM diharapkan lahir pemimpin di masa depan yang memiliki semangat juang dan kebangsaan tinggi.
2. Kebijakan MBKM diciptakan agar dapat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap mahasiswa untuk semakin memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan kompetensi di dunia nyata yang sesuai dengan potensi diri, bakat, minat, semangat dan cita-citanya. Terbukanya kesempatan ini berdasarkan kemampuan diri setiap individu yang berbeda-beda.
3. Kegiatan proses belajar dapat dilakukan di berbagai tempat, belajar yang tidak terbatas, tidak sebatas di ruang kelas, perpustakaan, studio, dan laboratorium, namun juga dapat dilakukan di pusat perindustrian, pusat penelitian, pabrik, lokasi pengabdian kepada masyarakat.

Esensi dari kebijakan MKBM adalah memberi hak seluasnya kepada setiap peserta didik di perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman terbaik (best experiences). Hak tersebut namun juga dibatasi berupa dalam masa maksimal 3 semester atau senilai 20-40 SKS. Kebijakan positif MKBM ini dapat

dilakukan di luar program studi, dalam perguruan tinggi yang sama atau di luar program studi pada perguruan tinggi berbeda.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia berkualitas. Tuntutan menyiapkan SDM ini sangat dibutuhkan di berbagai bidang profesi dan keahlian. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Unggul sangat penting dalam rangka memacu akselerasi pembangunan (Rohman, 1997).

Era Globalisasi telah mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi prioritas parameter kemajuan suatu bangsa. Sistem Pendidikan nasional terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan peradaban dunia telah memasuki era berbagai inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat (Ilyasir, 2019).

Merumuskan kebijakan Pendidikan nasional memerlukan pemikiran mendalam. Dalam merumuskan kebijakan Pendidikan nasional, mutlak diperlukan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pentingnya landasan aksiologis kebijakan Pendidikan nasional menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis teori Pendidikan yang di aplikasikan berkaitan dengan tujuan Pendidikan nasional, terutama berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan berfikir rasional dan membentuk akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila adalah nilai religious, kemanusiaan, persamaan, demokrasi dan keadilan sosial (Soeprapto, 2013). Pendekatan filsafat Pendidikan dapat dipakai untuk mengkritisi suatu kebijakan pendidikan nasional. Filsafat Pendidikan adalah satu cabang ilmu

filsafat yang obyek kajiannya adalah bidang Pendidikan.

Pendekatan filsafat Pendidikan sebagai pemikiran kritis yang mengkaji secara kritis kebijakan Pendidikan sampai pada hakikatnya. Melalui filsafat Pendidikan, dapat dikaji secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis kebijakan Pendidikan. Kajian ontologis adalah menganalisis hakikat keberadaan Pendidikan yang sangat terkait dengan keberadaan manusia. Kajian epistemologis adalah menganalisis hakikat kebenaran yang terkait dengan kebenaran dari teori-teori Pendidikan. Landasan aksiologis adalah analisis tentang aplikasi teori-teori Pendidikan yang telah berkembang di Barat (Soeprapto, 2013).

Filsafat akan selalu mendasari gerak hidup manusia, termasuk dalam kebijakan pendidikan. Di sisi lain filsafat juga kerap menimbulkan sikap spekulatif dari setiap pemikirnya. Sifat spekulatif dalam memahami secara kurang tepat, bahwa filsafat juga berkaitan erat dengan fakta. Ilmu filsafat jelas tidak dapat meninggalkan fakta, di sisi lain persoalan pengkajian filsafat dapat melampaui suatu kebijakan, termasuk pada kebijakan Pendidikan.

Proses Pendidikan yang baik dapat melahirkan kemandirian suatu bangsa. Proses Panjang Pendidikan dapat menjadikan kemandirian suatu bangsa berbasis kepada pemahaman utuh terhadap suatu realitas yang dapat mengubah satu peradaban mulia yang menjunjung tinggi akal sehat, menghormati keanekaragaman dan peri kemanusiaan (As'arie, 2012: 22). Nadiem juga menambahkan akan tiga dosa pemerintah yang kurang diperhatikan yaitu; intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (Kemendikbud RI, 2020). Dalam kaitan dengan mengatasi intoleransi dengan memasukan nilai multicultural di dalam kurikulum, yang sudah disadari pemerintah sejak era reformasi (Firdaus &

Dian Kurnia Anggreta , 2020) dan pendidikan multikultur yang sudah digaungkan sejak lama (sekitar 40 th yang lalu oleh pejuang hak azazi) dan masih terjadi intoleransi yang meningkat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Toleransi itu sendiri definisinya bukan suatu yang fisik, melainkan merupakan hubungan antar manusia. Toleransi itu juga berupa sikap untuk menahan diri, menerima orang, ide dari orang yang berbeda (King, 1998; hal 22).

Tanggapan dari Žižek akan pendidikan saat ini di dunia kapitalisme, yang kurang membuat manusia berpikir kritis dengan refleksi, sehingga terjadi sesuatu yang dikatakan Marx bahwa “kita tidak tahu apa yang kita lakukan“. Sehingga akan menjadi “kesadaran yang salah“ karena sudah terbiasanya dengan sesuatu hal sehingga menjadi kita tahu apa yang kita lakukan dan terus melakukan hal tersebut (Wall, T., & Perrin, D. (2015), termasuk kesalahan yang dilakukan dan tanpa perubahan berarti. Hal ini juga membuat kita berulang kali melakukan sesuatu tanpa menyadari kalau perubahan belum banyak terjadi.

Konsep toleransi sendiri seperti pisau bermata dua, apabila orang memberdayakan orang lain untuk bersikap untuk toleransi terhadap sesamanya, sebenarnya orang itu juga menimbulkan kemungkinan orang lain untuk menjadi intoleran terhadap sesamanya. Kita perlu menghilangkan kemampuan untuk intoleran seperti juga untuk menghilangkan untuk bertoleransi. Seandainya toleransi hilang maka akan terjadi ketidakperdulian dan penguatan intoleransi. Keberatan akan sikap intoleran perlu diseimbangkan dengan penerimaan sikap intoleran juga dan bisa dikurangi dengan suatu perubahan sikap (King, 1998). Freire sadar bahwa pedagogi yang kritis akan berbahaya bagi

politisi elite, agama yang ekstrim, fundamentalis dan nasionalis sayap kanan di seluruh dunia. Tugas pendidik untuk membuat siswa menjadi agen kritis yang aktif bertanya dan negosiasi antara teori dan praktek, analisis kritik dan pengetahuan umum, dan perubahan sosial dan pembelajaran (Giroux H. A., 2011).

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi (Sugiarta, Mardana, Adiarta, & Artanayasa, 2019).

Salah satu aspek yang sering dilupakan pengembangan humanis untuk mengatasi intoleransi. Pendidikan masa kini yang cenderung berat pada pengetahuan dan ketrampilan sehingga proses pendidikan karakter terabaikan. Hominisasi dan humanisasi sebagai proses pendidikan karakter. Proses hominisasi (Driyarkara, 1980:82) yaitu proses kementerian manusia secara alami, artinya proses terjadinya manusia mulai dari kandungan ibunya, tumbuh dan berproses untuk sampai pada kemanusiaanya. Manusia bukanlah makhluk biologis, melainkan seorang pribadi atau person, seorang subjek, artinya mengerti diri, menempatkan diri dalam situasinya, mengambil sikap dan menentukan dirinya: nasibnya ada di tangan sendiri. Hominisasi tidak pernah lepas dari humanisasi. Humanisasi biasanya merujuk pada perkembangan yang lebih tinggi. (Driyarkara, 1980: 83). Freire berpendapat bahwa tidak ada satupun teori Pendidikan yang dapat dipisahkan dari konsep manusia. Sebagai seorang humanis revolusioner, Freire memperlihatkan

kemampuannya cintanya terhadap kemanusiaan sementara teori pedagogiknya berdasar kepercayaan dan faith di masyarakat (Freire, 1971). Freire memiliki sudut pandang yang sangat optimis tentang manusia. Ia percaya terhadap kapasitas setiap manusia untuk berfikir, bercermin, dan mengatasnamakan dunia dalam rangka untuk menciptakan sejarah dan budaya, walaupun tidak masalah sama sekali betapa "ignorant" manusia itu. Freire tegas menolak catatan bahwa manusia adalah kotak kosong, dalam argumennya bahwa setiap individu telah memiliki pengetahuan pengalaman bernilai dan opini melalui hubungan mereka dengan dunia dan makhluk hidup lainnya.

Manusia memiliki kemampuan untuk melihat secara kritis dunia mereka melalui pertemuan dialogis dengan manusia lainnya. Manusia sesungguhnya menganggap dialog sebagai kebutuhan eksistensial. "Dialog adalah pertemuan manusia, yang dimediasi oleh dunia, untuk menamai keberadaan dunia" (Freire, 1971: 76). Freire (1971) menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak lengkap, memiliki panggilan ontologis dan historis untuk kemudian menjadi lebih manusiawi, lebih lengkap. Apa yang Freire maksud dengan 'panggilan ontologis' adalah tugas utama manusia untuk mewujudkan potensi penuhnya sebagai manusia.

Dalam proses 'menjadi', kemudian manusia berusaha untuk terus memanusiasi diri mereka sendiri melalui penamaan dunia dalam aksi - refleksi dengan manusia lain. Sebaliknya, "dehumanisasi ... adalah distorsi kebutuhan untuk menjadi lebih manusiawi" (Freire, 1971: 28). Dehumanisasi tidak boleh dianggap sebagai realitas yang tertutup dan statis, tetapi sebagai situasi tertentu yang dapat diubah. Karena itu bukan takdir yang

diberikan tetapi dibangun secara sosial, ini termasuk dalam bidang ilmu humaniora dan sejarah.

Konteks penindasan – tertindas, keduanya saling terkoneksi secara dialektik. Kebebasan manusia adalah prasyarat untuk mencapai humanisasi. Freire percaya pada kapasitas orang yang tertindas untuk menjadi "manusia baru" yang tidak meniru kepribadian penindas mereka ketika mereka dibebaskan. Pembebasan dengan demikian bertujuan untuk menghasilkan manusia baru yang memiliki kualifikasi tertentu, seperti menjadi adil, toleran dan demokratis sebagai lawan dari sikap otoriter dan opresif.

Manusia sebagai subyek berakar dalam pergulatan sejarah. Dalam diskusinya tentang Paulo Freire, Colin Lankshear (1993: 95) mengatakan bahwa bagi Freire manusia "adalah" makhluk praxis "yang hidup secara autentik hanya ketika terlibat dalam penyelidikan dan transformasi kreatif dunia". Dengan demikian, manusia sadar akan historisitasnya: sebagai makhluk sejarah, mereka sadar hidup dalam waktu dan lokasi tertentu yang didasari oleh banyaknya dimensi kehidupan, seperti jenis kelamin, ras, agama, politik, budaya, dan ekonomi.

Freire (1971) berpendapat bahwa karakter khas manusia adalah kemampuan mereka untuk berpikir dan terlibat dalam dunia sejarah dengan tujuan tertentu. Kapasitas reflektif memungkinkan manusia untuk melepaskan diri dari dunia dan memberi makna padanya. Tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun alam bawah sadar manusia itu sendiri. Kerap kita juga melihat manusia berperilaku seperti binatang. Sifat manusia pada dasarnya tidak hanya memiliki sisi terang, tetapi juga sisi gelap. Orang bisa berperilaku baik atau buruk. Merupakan suatu kegagalan untuk memperhitungkan



penilaian manusia dalam analisis satu sisi dan "mengabaikan kemungkinan bahwa refleksi kritis ini dapat dikombinasikan dengan kepentingan diri sendiri untuk membawa situasi yang lebih menindas dari sistem dominasi sebelumnya".

### **Arkeologi Kesadaran.**

Teori tingkat kesadaran yang dikemukakan oleh Freire sangat penting untuk memahami pemikirannya. Freire mengembangkan teori ini dalam Pendidikan untuk Kesadaran Kritis, Pedagogi Orang Tertindas dan Aksi Budaya untuk Kebebasan. Arkeologi kesadaran melibatkan studi tentang bentuk dasar kesadaran. Freire berpendapat bahwa "kesadaran didasari oleh dialektika objektifikasi dan tindakan manusia atas dunia" (1972: 53). Dia setuju dengan pandangan Marx bahwa dunia sosial berkontribusi untuk membentuk struktur kesadaran seseorang dan pada gilirannya kesadaran seseorang berkontribusi untuk membentuk dunia sosial. Hubungan antara konteks sosial-ekonomi dan budaya dan struktur kesadaran seseorang pada dasarnya bersifat dialektis. Kesadaran orang tentang dunia dapat diamati melalui cara mereka memandang realitas eksistensial mereka. yaitu, apakah mereka melihatnya secara naif, takhayul, atau kritis. Pertanyaan mendasar adalah: apakah orang membedakan .

Untuk memperkuat argumennya, Roberts menghadirkan pertahanan kuat Freire kepada Kevin Harris (1979: 174). Harris berpendapat bahwa peningkatan kesadaran diperlukan dan diinginkan dalam situasi di mana orang tidak memahami realitas eksistensial mereka. Berbeda dengan Berger, bagi Harris, setiap individu dapat mencapai tahap kesadaran kritis, terlepas dari status sosial mereka, baik yang diberdayakan / dididik atau dieksploitasi / dicabut. Peningkatan kesadaran tidak berarti memaksakan

pandangan satu terhadap yang lain, melainkan, mendorong orang untuk memeriksa dunia mereka secara kritis. Žižek termasuk filsuf saat ini yang tidak menawarkan suatu solusi yang jelas dalam dunia pendidikan, tetapi membuat pengamat mengambil peran aktif untuk memahaminya.

Komitmen untuk menavigasi dan menangani masyarakat kapitalis kontemporer dengan memobilisasi motivasi bawah sadar kita. pedagogi kritis Žižekian; sebuah cara untuk melibatkan kita dalam berpikir tentang pendidikan tanpa jawaban yang ditetapkan atau ditentukan, tetapi dengan pertanyaan penting yang membawa kita pada rollercoaster intelektual penyelidikan tentang apa yang mungkin terlibat dalam pendidikan, dan oleh karena itu akan menjadi apa (Wall & Perrin, 2015; p 5). Hal ini akan membuat pendidik berperan kritis terhadap dunia pendidikan secara terus menerus.

Penulis setuju dengan posisi Harris. Penulis menduga bahwa kritik Berger didorong oleh pandangan tentang netralitas literasi atau praktik pedagogis. Posisi ini dapat membuat seseorang menilai intervensi pendidikan sama dengan pemaksaan. Penulis ingin menyatakan bahwa, walaupun kita harus menghormati perspektif dan kepercayaan multi-budaya, ini tidak berarti bahwa praktik pendidikan harus netral dan tanpa nilai apa pun. Posisi Freire jelas: "Netralitas pendidikan adalah salah satu konotasi mendasar dari visi pendidikan yang naif" (1987: 41). Pedagogi tidak pernah netral karena itu adalah tindakan politik. Politik Pendidikan. Antonio Gramsci memandang politik sebagai sesuatu yang mendidik, dalam arti bahwa aktivitas politiknya memberikan konten pendidikan (Diana Cohen, 1998). Politik tidak hanya dianggap sebagai seni mendapatkan kekuatan: ia memiliki nilai

pendidikan. Demikian juga, Ernesto Che Guevara memberikan konten pendidikan aksi revolusionernya, bergabung dengan revolusi "(dikutip dalam Jim Walker, 1981: 120). Freire dimulai dari titik keberangkatan yang berbeda dibandingkan dengan angka-angka ini. Alih-alih memberikan konten pendidikan politik atau revolusi, ia memberikan konten politik pendidikan. Baginya, pendidik harus menyadari sifat politik dari praktik mereka. "Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pendidikan adalah tindakan politik, seperti halnya tidak cukup untuk mengatakan bahwa tindakan politik juga mendidik. Penting untuk benar-benar mengasumsikan sifat politik pendidikan"(Freire, 1998).

Mengapa Freire memberikan konten politik pendidikan? Ini karena filsafat pendidikannya didasarkan pada filsafat praksis, hubungan otentik dan dialektis antara refleksi dan tindakan. Pada titik ini, Freire menambahkan makna baru pada tesis kesebelas terkenal Marx tentang Feurbach: "Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, intinya, adalah untuk mengubahnya" (Cornell West, 1993).

Pedagogi Tertekan penuh dengan nuansa politis, dimanifestasikan dalam kosakata penindasan, dehumanisasi, objektifitas, budaya diam, pembebasan, emansipasi, penyadaran, subjektivitas, humanisasi, dll. Istilah-istilah ini merupakan indikasi yang jelas dari kepercayaan Freire pada kekuatan dan potensi pendidikan untuk membawa perubahan sosial melalui agensi manusia. Konstruksi pendidikan yang ideal adalah yang etis dan utopis, yang dapat memperbesar ruang publik yang demokratis dan menghasilkan struktur sosial yang adil di mana umat manusia dilindungi dan kondisi manusia meningkat.

Freire mengusulkan pendidikan sebagai "Bahasa Kritik" (Giroux, 1992: 18) dengan menghubungkan pendidikan dengan kekuasaan dan politik karena ketiga domain ini saling terkait. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang lebih luas di mana ia ada, karena didasari oleh banyaknya dimensi dalam formasi sosial yang diberikan, pendidikan telah mengambil peran menghasilkan dan menciptakan kehidupan publik. Pertanyaan sebenarnya sebenarnya ..

"Bahasa harapan". Harapan tidak statis atau semata-mata emosional, tetapi kekuatan motorik dan "kebutuhan ontologis" (Freire, 1994: 8), yang sangat penting dalam pendidikan pembebasan. Gagasan Freire tentang mengalihkan fokus belajar dari guru ke siswa tidak diragukan lagi mengubah hubungan kekuasaan, tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di ranah sosial. Pernyataannya bahwa "pendidikan adalah politik" (Freire, 1987: 46) berarti bahwa semua kegiatan pendidikan bersifat politis dan memiliki kualitas dan konsekuensi politik. Cara guru mengajar, preferensi pengetahuan yang akan dibangun, semuanya bersifat politis, karena semuanya berkontribusi untuk membebaskan atau menjinakkan siswa.

Guru harus konsisten dengan pilihan dan nilai-nilai politik mereka. Tidak masuk akal bagi para guru untuk menyatakan dan mengajarkan demokrasi dan keadilan sementara pada saat yang sama menekan suara-suara individu di kelas. Sulit menerima seorang guru yang mengadvokasi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan egaliter sambil mempertahankan hubungan otoriter dengan murid-muridnya. Konsistensi antara berbicara dan bertindak penting untuk dipertahankan dalam diri pendidik. Dalam proses pembelajaran, bukan bagaimana memiliki dan mengakumulasi pengetahuan, tetapi bagaimana memahami, mengkritik,

menghasilkan, dan menggunakan pengetahuan sebagai sarana mentransformasikan realitas (Almann, 1999). Hanya dalam perspektif ini proses pembelajaran menghasilkan implikasi politik.

Freire berpendapat bahwa tidak hanya metodologi penting untuk proses pembelajaran, tetapi juga isinya, karena itu memainkan peran penting dalam pembentukan subjektivitas, yaitu cara siswa memahami dunia. Pada titik ini, penting untuk melihat bagaimana Henry A. Giroux (1983: 176-204) dan Peter McLaren (1998: 174-175) mengembangkan apa yang disebut "pengetahuan emansipatoris", sebuah gagasan yang diilhami oleh Jurgen Habermas tetapi yang memiliki hubungan kuat dengan pemikiran Freire.

Mengikuti Habermas, mereka membagi pengetahuan menjadi tiga jenis: teknis, praktis dan emansipatoris. Karakteristik pengetahuan teknis adalah kontrol, kepastian, objektivitas, dan nilai bebas. Implikasinya bagi teori pendidikan adalah bahwa teori tersebut harus beroperasi untuk kepentingan cara berpikir yang seperti hukum dan memisahkan pengetahuan dari proses pembelajarannya berdasarkan pengetahuan teknis yang mengarah pada kontradiksi dialektis antara guru yang berfungsi sebagai pemancar pengetahuan dan siswa.

Alat analisis diperlukan untuk menafsirkan sifat realitas. Ini membantu siswa untuk menganalisis kategori dan asumsi yang merupakan kenyataan dan bagaimana mereka berkontribusi pada pemahaman seseorang tentang dunia. Konstitusi realitas dimediasi oleh bahasa di mana manusia terus-menerus menghasilkan dan mereproduksi makna melalui interpretasi mereka terhadap dunia. Implikasi dari model ini untuk pendidikan adalah bahwa pengetahuan tidak disampaikan melalui pemaksaan

tetapi lebih dimediasi melalui dialog timbal balik di antara peserta didik. Siswa didorong untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan nilai-nilai mereka sendiri dan memahaminya dalam hal pengalaman hidup sehari-hari.

Namun, itu pasti gagal untuk mengembangkan jenis analisis yang dapat memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dan kekuatan, terutama bagaimana kekuatan dan ideologi dominan menghasilkan serangkaian makna, pemahaman dan praktik yang mendukung dan mempertahankan dominasi struktural mereka, sementara pada saat yang sama mencegah munculnya komunitas kritis. Jenis terakhir adalah pengetahuan emansipatoris, yang mengarahkan siswa untuk memahami realitas sosial kekuasaan, dengan alasan bahwa realitas dibentuk oleh paradigma yang saling bersaing yang masing-masing membawa refleksi diri menghadirkan pengetahuan emansipatoris di kelas memiliki efek mengubah siswa menjadi mata pelajaran - mandiri dan makhluk-makhluk terbebaskan yang telah menemukan suara mereka.

Pengetahuan Emansipatoris didasarkan atas dasar kritik dan tindakan, yang berarti bahwa ia selalu melibatkan, sebagai bagian dari proses historis, dalam mengkritik realitas sosial dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Dasar untuk menilai pengetahuan kemudian bukanlah apakah itu "benar" atau "salah", tetapi apakah itu liberal atau menindas. Jika demikian, proses pembelajaran yang berfungsi untuk menyebarkan cara berpikir ini harus dirancang sedemikian rupa untuk mempromosikan kesadaran kritis dan kebebasan pribadi yang diperlukan untuk pembentukan diri individu. Ini adalah jenis pengetahuan yang benar-benar dapat memberdayakan siswa.

Manusia merdeka adalah kondisi awal untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Freire sangat mempercayai kapasitas dan kondisi tertekan dapat melahirkan “manusia yang baru”. Paulo Freire adalah salah satu pemikir penting di bidang Pendidikan pada abad ke-20. Pemikiran-pemikiran Freire telah diimplementasikan di berbagai belahan negara dan konteks Pendidikan. Filsafat pendidikan Freire terbagi atas 3 bagian penting yaitu: filsafat manusia, arkelogi dari kesadaran, dan pendidikan sebagai bagian dari politik. Filsafat Freire tentang manusia dapat dijelaskan sebagai humanism Kristian-Marxisme. Freire memperlihatkan kecintaan profound terhadap kemanusiaan seiring dengan teori pedagogik berdasar kepada kebenaran mendasar dan faith masyarakat.

Freire membagi tiga tipe kesadaran manusia yaitu magis, naif, dan kritis. Freire memandang manusia tersebut belum selesai seutuhnya karena manusia itu berproses. Menjadi manusia yang utuh berarti manusia yang otonom terhadap diri, realitas dan dunianya. Dalam pandangan Freire, humanisasi adalah sebuah gambaran manusia yang ideal, dimana manusia tersebut memperoleh keutuhan dan untuk menjadi manusia yang ideal membutuhkan manusia yang sadar diri. Adanya kesadaran dalam diri manusia itu diperoleh dengan kebebasan. Dalam konteks Merdeka Belajar di Pendidikan Seni, diharapkan mahasiswa tetap bisa memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan berimajinasi, kebebasan berinovasi, namun dalam koridor kemerdekaan. Mengutip dari seorang penyair (Eza Azerila), Orang merdeka adalah orang yang hanya berorientasi pada nilai ketuhanan, kebenaran, keadilan, keindahan, cinta, dan kasih sayang. Konstruksi pendidikan Freire mengarah kepada pendidikan yang nantinya

menghantar orang keluar dari belenggu penindasan. Sedangkan Tamansiswa lebih mengutamakan nilai luhur, budi pekerti yang kemudian menghantar orang kepada terciptanya rasa kasih sayang atau saling menghormati antarsesama. Metode yang digunakan Freire adalah metode hadap-masalah dimana peserta didik diarahkan untuk berpikir lebih kritis dalam menghadapi masalah dan memecahkannya. Sedangkan Tamansiswa menggunakan metode Among yang sifatnya melayani, menuntun dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara menyeluruh, baik lahir maupun batin (Sesfao, 2020)

### **Kesimpulan**

Ide Freire tentang kemerdekaan belajar dan situasinya lebih tepat diterapkan saat era Soerharto yang kondisi pendidikan dan bantuan pendidikan tidak seperti saat ini. Walaupun begitu pemikiran Freire tentang pluralistik banyak diadopsi juga pada kurikulum untuk memerdekakan cara berfikir yang tidak fanatik agama, suku bangsa, gender dsb. Pemikiran kritis Freire ini yang juga menjadi pemicu gerakan theologi kebebasan di Amerika Latin. Pemikiran pendidikan merdeka dari Mentri Nadiem Makarim ini banyak juga untuk menekankan kebebasan untuk magang di perusahaan atau belajar lintas ilmu yang sebenarnya lebih ke arah pemikiran inter dan transdisiplin ilmu. Sedangkan pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan guru dsb juga merupakan kelanjutan di era Presiden, sehingga boleh dibilang kondisi ekonomi dari guru dan siswa sudah mulai lebih maju dibanding saat pemikiran kritis Freire mengenai ketimpangan sosial dan ekonomi di Brazil yang saat itu ada di Era Presiden Suharto. Walaupun begitu pemikiran tentang kesetaraan gender dan pelecehan seksual

dari Menteri Nadiem juga akan menjadi lebih baik lagi bila dapat mengatasi intoleransi agama, polarisasi dan elit politik.

### Daftar Pustaka

- Abidah, (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education (SiPoSE)*, 38-49.
- Agus, K. C. (2021). Pendidikan Jiwa Merdeka. Jakarta: Kompas
- Dewantara, K. H. (1977). Pendidikan (Vol. 1). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa
- Driyarkara, (1980). Driyarkara tentang pendidikan. Yogyakarta: Kanisius.
- Firdaus, & Dian Kurnia Anggreta . (2020). Inernalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies for Multicultural Problems and Intolerance in Indonesia. *Jurnal Antropologi : Isu-isu Sosial Budaya*, 22(1).
- Giroux, H. A. (2010). Rethinking Education as the Practice of Freedom; Paulo Freire and the promise of critical pedagogy. *Policy Futures in Education*, 8(6), 715-721.
- Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York: The Continuum International Publishing Group.
- Hendratmoko, T., Kuswandi, D., & Setyosar, P. (2017). Tujuan Pembelajaran Berlandaskan Konsep Pendidikan Jiwa. *JINOTEP*, Volume 3, Nomor 2, April 2017, 152-157.
- Ilyasir, F. (2019). Pendidikan Demokratis di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 7(1), 60-74.
- Kemendikbud RI (2019, 11 Desember). Merdeka Belajar eps.1 [Video]. Youtube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=vh-rdXvt0Dw>
- \_\_\_\_\_ (2020, 26 Januari). MERDEKA BELAJAR eps 2: KAMPUS MERDEKA [Video]. Youtube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=vh-rdXvt0Dw>
- \_\_\_\_\_ (2020, 11 Februari). MERDEKA BELAJAR eps 3: PENYALURAN dan PENGGUNAAN DANA BOS [Video]. Youtube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=vh-rdXvt0Dw>
- \_\_\_\_\_ (2020, 11 Februari). MERDEKA BELAJAR eps 4: PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK [Video]. Youtube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=NghoOEtymYk>
- King, Preston (1998). *Tolerantion*, Oregon : Frank Cass Publisher.
- Marisyah, A., Firman, & Rusdinal. (2019). Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan. *Pendidikan Tambusai*, 3(6), 1514-1519.
- Merdeka.com. (2020). Jokowi Ungkap Masalah Perguruan Tinggi: Kekurangan Dosen hingga Kelas Tak Layak, diunduh 5 Juli, 2020.
- Mudhofir, A. (2013). Filsafat Sebagai Wahana Pendidikan Menuju Kemandirian Bangsa, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, tahun XXX(2), 240-249.
- Nuryatno, M. Agus. 2011. Critical Remarks on Educational Philosophy of Paulo Freire, *Jurnal*

- Cakrawala Pendidikan, tahun XXX(1), 1-16.
- Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. 2020. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rohman, A. 1997. Makna Strategis Pendidikan Unggul dalam Memacu Akselerasi Pembangunan Bangsa, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3(XVI), 17-29.
- Sesfao, M. (2020). Perbandingan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire Dengan Ajaran Taman Siswa Dalam Implementasi Merdeka Belajar. *“Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa”*, (pp. 261-272).
- Soeprapto, Sri. 2013. Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, XXXII(2), 266-276.
- Sugiarta, I. M., Mardana, I. B., Adiarta, A., & Artanayasa, I. W. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (Tokoh Timur). *Filsafat Indonesia*, 2(3), 124-136.
- Supeno. 1981. Filsafat. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, tahun I(1), 29-40.
- Siswanto. 2007. Pendidikan sebagai paradigma pembebasan, *Tadris*. Volume 2. Nomor 2. 2007
- Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Cetakan ke-1: 2020 (<http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020.pdf>)
- Wall, T., & Perrin, D. (2015). *Slavoj Žižek A Žižekian Gaze at Education*. New York: Springer.
- Žižek, S. (2010). A permanent economic emergency. *New Left Review*, 64, 85–95.